

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI WITYOWATI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DEWAN**
3. NHK : **93098**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **942.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 365 m2/216 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 797.000.000
2. Tanah Seluas 174 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **222.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA CB150R SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 21.000.000
3. MOTOR, VESPA P 150 X SEPEDA MOTOR Tahun 1980, HIBAH
TANPA AKTA Rp. 4.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2017, LAINNYA Rp. 25.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **117.240.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **302.405.433****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **1.583.645.433****III. HUTANG** Rp. **----**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.583.645.433

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.